

**KONTRIBUSI DEMOKRAT DALAM PUBLIC POLICY-MAKING DAN  
PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION**  
*(Sebuah Reaserch dan Study Di Kabupaten Serdang Bedagai)*

Oleh

Prayetno

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

**ABSTRAK**

Kontribusi dari Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk mengubah sistem politik di Indonesia, dapat dilihat dari fungsi dan tujuan dari pihak terafiliasi, kehadiran Demokrat juga membantu pemerintah membuat keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bangsa Indonesia. Pembuatan kebijakan dapat dilihat dari analisis dan model dengan menggunakan tahap pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diberikan dalam berbagai bentuk. Baik itu untuk kepentingan Partai Demokrat maupun kepentingan publik dalam bentuk pengajuan dana, kebijakan pertanian, konstruksi jalan, wisata bahari, dan lain-lain. Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat di Serdang Bedagai melalui perwakulannya di DPRD maupun yang di luar parlemen cukup berkontribusi pada penciptaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diterapkan dalam upaya untuk menciptakan good governance di Kabupaten Serdang Bedagai.

**Kata Kunci: Partai Demokrat, Kebijakan Publik.**

**ABSTRACT**

*Contribution of Democratic Party in the process of public policy making to change the political system in Indonesia, can be seen from the function and purpose of the affiliated party, the Democratic presence also helps governments make decisions to solve the problems of the Indonesian nation. Policy-making can be seen from the analysis and the model using the stage of public policy making. Public policy is given in various forms. Whether it's for the sake of the Democratic Party and the public in the form of funding submissions, agricultural policy, road construction, marine, and others. Some of the above suggests that the Democratic Party in Serdang Bedagai through representatives in parliament and outside parliament enough to contribute to the creation and implementation of public policy. It is applied in an attempt to create good governance in Serdang Bedagai.*

**Key Word: Democratic Party, Public Policy.**

---

## 1.PENDAHULUAN

Keberadaan Partai Demokrat merupakan sebuah kewajaran dalam sebuah system demokrasi. Demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Demokrat adalah salah satu sarana yang memiliki ragam fungsi, program partai (*platform*) dan dasar pemikiran. Fungsi Demokrat sebagai salah satu partai politik bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menilai demokratisasi dalam suatu pemerintahan.

Pada perkembangannya, Partai demokrat atau partai politik lainnya dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (*policy*) melalui sistem ketatanegaraan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk mendirikan partai politik, maka disinilah kita mengetahui sesungguhnya dua instrumen penting negara yaitu bagaimana pemerintah atau negara dan warga negara tersebut berinteraksi.

Kontribusi dan posisi Demokrat sebagai Partai Politik dalam proses interaksi antara pemerintah atau negara dengan rakyat dalam wujud kebijakan, disadari telah menjadi idealitas terjauh dari identitas partai modern. Masyarakat modern adalah mereka yang memandang politik tidak lagi sebatas ikatan ideologis dan keyakinan semata. Masyarakat modern lebih melihat politik sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik menurut Howlett, (Koirudin, 2004:67 ).

Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mengidentifikasi kualitas dari lembaga- lembaga sosial politik yang hidup di masyarakat. Masyarakat modern semakin cerdas dan makin cukup akses terhadap informasi perubahan- perubahan yang terjadi saat sekarang ini. Masyarakat modern adalah mereka yang benar-benar memahami arti partisipasi mereka dalam proses politik negara.

Jika di tinjau dari struktur politik, revolusi membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik Indonesia, karena pada saat itu masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk bisa memahami segala perubahan tersebut.

---

Frederich, (dalam Suroto dkk,2003:21) mengatakan bahwa: Partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya.

Berdasarkan hal itu, Partai Demokrat juga dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pendapat didalam masyarakat akan melahirkan keinginan untuk membentuk suatu partai sesuai dengan ragam pendapat yang hidup. Perlu di ketahui bahwa, sebagai partai Demokrat juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana setiap partai menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan.

David Easton,(Budiardjo;2004), mengatakan bahwa terdapat tiga proses yang menjadi saluran bagi terselenggaranya sebuah sistem, yaitu *input*, *process* dan *output*. *Input* terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, *process* yang tidak lain adalah proses pembuatan kebijakan, dan *output* yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa partai demokrat merupakan saluran bagi sebuah sistem politik yang terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datangnya dari masyarakat. Sehingga membantu pemerintah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum (*policy public*).

Dari uraian dan latar belakang diatas, pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana sesungguhnya kontribusi partai demokrat dalam upaya mendukung dan ikut menentukan peroses perumusan kebijakan publik di kabupaten serdang bedagai?

---

### **A. Pengertian Partai politik**

Kehadiran Partai politik sesungguhnya merupakan pilar utama penegak demokrasi politik yang efektif. Partai politik adalah yang paling mempunyai kesempatan dalam melakukan perubahan. Kekuasaan politik negara secara terorganisasi berada pada partai politik. Hal ini merupakan salah satu ciri kehidupan demokrasi pada masyarakat modern yang mengedepankan supremasi sipil. Kata “partai” menunjukan kepada sekumpulan orang-orang, jadi menunjuk kepada perkumpulan sejumlah warga negara dari suatu negara yang menggabungkan diri dalam suatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu. Partai politik merupakan suatu perkumpulan yang terorganisasi. Untuk menyokong suatu prinsip atau kebijakan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau undang-undang. *Burke*, (Basri 2011:117) menyatakan bahwa: “partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional bersama-sama, berdasar pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setuju”.

Selain itu dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2008 (pasal 1) tentang partai politik menyatakan bahwa yang dimaksud “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

### **B. Fungsi dan Tujuan Partai Politik**

Kehadiran Partai politik di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia sebagai wadah atau penyalur aspirasi mereka. Menurut Putra, (2003:15 ) fungsi-fungsi Partai Politik adalah: 1). “Fungsi artikulasi kepentingan, yaitu suatu proses pengimputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislative, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat

---

terwakili dan terlindung dalam pembuatan kebijakan publik. 2). Agregasi kepentingan, yaitu cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternative pembuatan kebijakan publik. 3). Fungsi sosialisasi politik, yaitu suatu cara untuk memperkenalkan nilai- nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. 4). Fungsi Rekrutmen politik, yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrative maupun politik. 5). Fungsi komunikasi politik, yaitu salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan”.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (pasal 11) menyatakan bahwa: “Partai Politik berfungsi sebagai sarana: 1). Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2). Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 3). Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 4). Partisipasi politik warga negara Indonesia. 5). Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik terbagi ke dalam dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Partai Politik adalah: 1). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2). Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3). Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4). Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Sementara secara khusus tujuan dari Partai Politik adalah: 1). Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 2). Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara umum fungsi dan tujuan partai politik ialah organisasi resmi penyaluran aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

### **C. Pengertian *Public Policy***

*Policy* atau kebijakan merupakan respon sistem politik terhadap kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kekuatan lingkungan dalam hal ini mempunyai pengaruh terhadap munculnya suatu kebijakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem politik adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik dimasyarakat yang berfungsi mengubah input (*demand, support* dan *resources*) menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat (*out-put*). Makna kebijakan sesungguhnya tidak cuma bersifat tekstual, melainkan lebih bersifat kontekstual, karena dari waktu ke waktu mengalami perubahan, oleh sebab itu maknanya tidak homogen. Dalam arti makna itu dalam realita mengikuti dinamika aksi sosio-ekonomi dan politik yang terjadi disekitar lingkungan.

Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Berdasarkan pengertian kebijakan dan publik diatas maka dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah menangani masalah-masalah umum yang berkaitan dengan sosial. Kebijakan publik merupakan jalan keluar adanya permasalahan- permasalahan bagi suatu negara terhadap warga negaranya.

*Dunn*, (Syafiie 1997:106) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas

---

pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain”.

Oleh karena itu dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislative, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan yang disampaikan oleh Sofyan (Syafiie, 1997:106).

#### **D. Public Policy-Making Process**

*Decision making process* terutama dalam hal *public policy-making* pemerintah memerlukan model dalam menyusun suatu kebijakan, dengan adanya model tersebut pembuatan kebijakan publik dapat dilakukan untuk mengambil suatu keputusan atau pendapat dari berbagai-bagai pihak. Model ini juga dapat membantu pekerjaan pemerintah dalam memahami dan memvisualisasikan realita kebijakan publik yang kompleks, sehingga mempermudah tugas pemerintah dalam mengupayakan dalam memahami bagaimana proses perumusan atau proses implementasi kebijakan publik itu. Dengan kata lain, untuk memudahkan pekerjaan analisis dalam memahami realita kebijakan yang kompleks yaitu membutuhkan alat bantu konseptual yang berfungsi sebagai pembimbing langkah.

Menurut Syafiie (1997:107-108) Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu; 1). Model Elit, yaitu pembentukan kebijakan publik hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. 2). Model Kelompok, yaitu model yang merupakan interaksi antar kelompok dan merupakan fakta senral dari politik serta pembuatan kebijakan publik. 3.) Model Kelembagaan, yaitu lembaga pemerintah. Yang masuk dalam lembaga- lembaga pemerintah eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan dapertemennya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah dan lain-lain. 4). Model Proses, yaitu rangkaian kegiatan

---

politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasinya. 5). Model Rasialisme yaitu, untuk mencapai tujuan secara efisiensi, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tetap, untuk meningkatkan hasil bersihnya. 6.) Model Inkrementalisme yaitu, berpatokan pada kegiatan masa lalu, dengan sedikit perubahan.

Dengan memperhatikan model-model di atas, membantu Pemerintah untuk lebih mudah mengetahui tujuan terhadap kebijakan yang harus diambil, sehingga Pemerintah dan anggota Dewan dapat memutuskan hasil yang lebih baik. Dengan demikian kebijakan yang telah diambil dapat ditunjukkan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dan meningkatkan publik itu sendiri.

Dengan menggunakan model-model dalam pembuatan kebijakan publik di atas, maka yang lebih harus diperhatikan Pemerintah adalah bahwa setiap keputusan yang telah diambil berasal dari berbagai pihak alternatif atau pilihan kebijakan yang ada atau bersama dengan anggota Dewan lainnya, sehingga permasalahan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan publik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengambil keputusan yang jelas.

#### **E. Implementasi Kebijakan Publik**

Perumusan dan implementasi kebijakan publik merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, secara garis besar dapat dikatakan fungsi implementasi merupakan suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam mewujudkan sarana-sarana tersebut.

Hoogwood, dkk, (Halking, 2005:55-56). Dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat antara lain : *Pertama*, berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. *Kedua*, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya waktu. *Ketiga*, apakah perpaduan sumber-sumber yang

---



diperlukan benar-benar ada. *Keempat*, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan disadari hubungan kasual yang andal. *Kelima*, seberapa banyak hubungan kasulitas yang terjadi. *Keenam*, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. *Ketujuh*, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. *Kedelapan*, adalah bahwa tugas- tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar”.

Sementara itu menurut *Dunn*, (*Halking*, 2005:56) dalam mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Sedangkan jenis evaluasi yang mendapat sedikit sekali perhatian adalah evaluasi lingkungan kebijakan, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik.

Sesuai dengan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasikan dari sudut kemampuannya dalam meneruskan/ mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang oleh pemerintah. sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan- tujuan kebijakan. Sehingga mudah dalam pengambilam keputusan kebijakan.

#### **F. Public Service**

Makna *public*/publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Terminologi umum dari makna *public service* atau pelayanan publik menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik

---

(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Surjadi, (2009:13) mengatakan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : 1). Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan. 2). Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 3). Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 4). Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5). Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 6). Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. 7). Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 8). Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan hak harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

---

Dalam upaya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip-prinsip pelayanan publik diperlukan upaya pengembangan kelembagaan birokrasi pemerintah, SDM aparatur maupun kualitas proses penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Poltak, (2006 : 6) secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :1). Transparansi. 2). Akuntabilitas. 3). Kondisional. 4). Partisipatif. 5). Kesamaan hak. 6). Keseimbangan hak dan kewajiban.

Pelayanan birokrasi terhadap publik/masyarakat sangat penting untuk di bahas dalam setiap perumusan dan penetapan kebijakan publik. Hal ini diharapkan agar dapat mencegah berlanjutnya penyimpangan dalam pelayanan birokrasi. Birokrasi harus dihindarkan dari rancangan dari pihak-pihak yang tidak menghiraukan kepentingan publik untuk menjadikannya sebagai *power center* (pusat kekuatan). Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Harapan demikian dihubungkan dengan menguatnya control masyarakat dan besarnya kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **II. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

Sementara itu, Guna mengetahui lebih jelas peranan Partai Demokrat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di Kabupaten Langkat, dapat di jelaskan dengan kontribusi yang diberikan partai demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan di Kabupaten Serdang Bedagai. Keberadaan partai demokrat terutama di kabupaten serdang bedagai telah ikut dan aktif memberikan pengaruh dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di Kabupaten tersebut. Adapun bentuk kebijakan publik yang diberikan Partai Demokrat antara lain adalah berupa pengajuan dana, kebijakan pembangunan jalan, kebijakan pertanian, kebijakan wisata bahari, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari fungsi partai politik bahwa Partai Demokrat selalu mengupayakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

---

Sebagai sebuah partai, Demokrat juga ikut memberikan sosialisasi politik dalam bentuk kebijakan kepada masyarakat, meskipun Partai Demokrat belum sepenuhnya aktif dalam memberikan nilai-nilai maupun sikap-sikap politik kepada masyarakat, akan tetapi keberadaan Partai Demokrat terus berusaha memberikan perubahan-perubahan yang ada di tingkat desa, di tingkat kecamatan, maupun ditingkat kabupaten dalam memberikan kebijakan publik di kabupaten serdang bedagai.

Selain itu Partai Demokrat di Kabupaten Serdang Bedagai juga memberikan pengaruh seperti pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang diberikan pemerintah. Disamping selalu mendorong, mengawasi dan mendukung pemerintah dalam bentuk dukungan-dukungan agar pemerintah tidak lalai dalam tugasnya. Beberapa sikap atau kontribusi yang diberikan partai demokrat antara lain; *Pertama*, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai Demokrat yang terdapat dalam lembaga legislatif. *Kedua*, Partai Demokrat dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Dapat juga dilakukan melalui dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik. Pada setiap mengikuti kegiatan-kegiatan politik, Partai Demokrat juga memiliki harapan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kebijakan publik dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung (*intermediary*) antara masyarakat dan negara. Sehingga, apabila ada hal yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah maka dapat dijembatani oleh partai politik. Dengan kata lain, Partai Demokrat dalam hal ini menunjukkan perannya, yaitu fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah serdang bedagai, baik melalui orang-orangnya yang duduk di DPRD atau yang berada di luar DPRD Kabupaten. Maka setiap anggota partai demokrat yang berada di DPRD kabupaten Serdang bedagai sangat berperan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus diluruskan atau diperbaiki jika tidak berpihak pada rakyat.

---

Partai demokrat juga ikut memberikan kontribusi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dalam memberikan kebijakan publik di Kabupaten Serdang Bedagai, baik penyuluhan-penyuluhan tentang kebijakan pertanian organik, wisata bahari di daerah pesisir maupun kebijakan- kebijakan yang lainnya. Selain itu Partai Demokrat juga memiliki harapan terwujudnya aspirasi masyarakat dalam rencana pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Serdang bedagai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa Partai demokrat selalu berjuang dan mengupayakan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat meskipun belum sepenuhnya kepuasan masyarakat itu terpenuhi. Namun demikian Partai Demokrat terus memiliki harapan supaya keinginan masyarakat dapat disalurkan atau terpenuhi dikemudian hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Partai Demokrat memiliki harapan dalam kegiatan politik terwujudnya aspirasi masyarakat dan mengupayakan keinginan masyarakat dapat dilaksanakan.

Selain itu, Partai Demokrat juga selalu aktif dalam memberikan dukungan dan evaluasi kepada Pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan jawaban responden dari wawancara yang dilakukan terhadap seratus orang responden, dengan 62% setuju terhadap pertanyaan tentang kontribusi partai demokrat.. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini bahwa Partai Demokrat aktif mengadakan *sharing* dengan pemerintah yaitu melalui anggota Dewan yang ada di DPRD kabupaten serdang Bedagai, sehingga Partai Demokrat dengan mudah memberikan masukan-masukan dalam bentuk kebijakan.

Partai demokrat juga pernah ikut dalam menyampaikan inspirasi masyarakat kepada Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partai Golkar menyampaikan inspirasi masyarakat seperti pembuatan beberapa peraturan daerah, pengajuan dana dan pengajuan pembanguna di tingkat daerah kabupaten Serdang Bedagai. Partai Golkar menunjukkan bahwa tujuan Partai Politik adalah memperjuangkan cita- cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat,

---

berbangsa, dan bernegara serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, dalam setiap perencanaan pembuatan kebijakan publik yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, partai Demokrat juga terlibat aktif di dalamnya. Berdasarkan wawancara dalam penelitian ini bahwa setiap anggota partai politik memiliki forum yang disebut Musbangkel/Des (Musyawarah Pembangunan Kelurahan/Desa) dimana seluruh anggota partai politik ikut menyelenggarakan dengan maksud untuk menjangkau aspirasi masyarakat ditingkat desa yang terakomodasi dan disini juga partai politik yang ada di tingkat daerah mengambil bagian untuk mengajukan pendapat dalam mengusulkan rencana untuk mendirikan pembangunan, baik kepentingan masyarakat yang belum dapat disalurkan.

## **I. PENUTUP**

Keberadaan Partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung (*intermediary*) antara masyarakat dan pemerintah (negara). Sehingga, apabila ada hal yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah maka dapat dijumpai oleh partai politik. Demikian juga dengan keberadaan serta fungsi Partai Demokrat yang memiliki peranan yang sangat penting dalam institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi. Keberadaan partai Demokrat berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politiknya supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam memberi perubahan pada sistem politik di Kabupaten Serdang Bedagai serta dalam kehidupan masyarakat. Kontribusi Partai Demokrat dalam memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan publik membawa dampak yang positif kepada masyarakat, dimana partai Golkar selalu mengupayakan kepentingan rakyatnya misalnya dalam pengajuan dana pembangunan, Kebijakan pertanian, kebijakan wisata bahari yang harus disampaikan kepada pemerintah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa, Keterlibatan Partai Demokrat dalam memberikan pengaruh seperti pengawasan, dukungan dan motivasi kepada

---

pemerintah daerah serdang bedagai dalam pelaksanaan kebijakan publik, merupakan bentuk dukungan terhadap Pemerintah Serdang Bedagai dalam menjalankan tugasnya, sehingga Pemerintah tidak lalai akan tugas maupun janjinya kepada masyarakat. Dalam arti lain, Partai Demokrat ikut mengontrol kinerja Pemerintah dalam memberikan dan menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Seta.2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Bekasi:Indie Book Corner.
- Kirbiantoro, S, dkk.2006. *Pergulatan Ideologi Partai Politik Indonesia*. Jakarta: PT Citra Mandala Pratama.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Malang: Pustaka pelajar.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik & Kebijakan Publik*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Sanit, Arbi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Pustaka Pelajar.

### **Perundang- undangan:**

Undang- undang No. 2 Tahun 2008 *Tentang Partai Politik*

Undang- undang No.2 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*

---